

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, negara-negara di dunia berlomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Pertumbuhan ekonomi juga penting karena dapat menjadi acuan dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara dan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dipastikan masyarakat negara tersebut juga memiliki hidup yang sejahtera. Pertumbuhan ekonomi juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat rencana atau strategi dalam membuat kebijakan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan memastikan pertumbuhannya senantiasa bergerak ke arah yang positif.

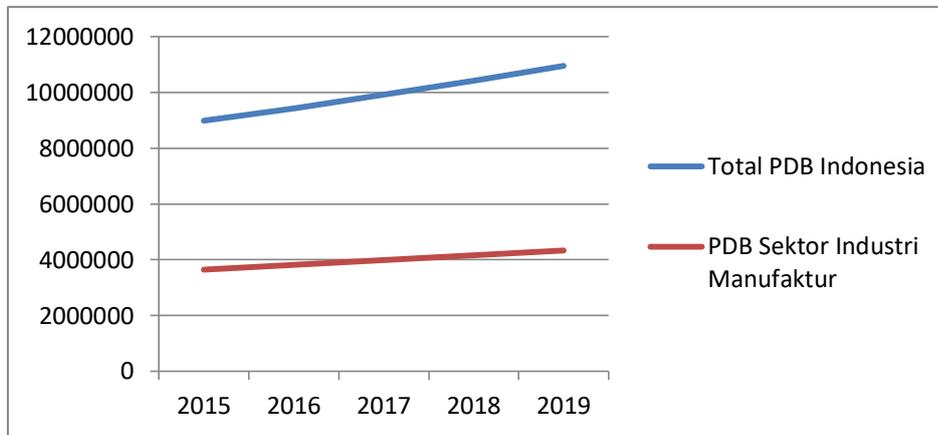
Industrialisasi sering kali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Revolusi industri yang dialami negara Inggris pada periode antara tahun 1750-1850 terjadi perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi berhasil mengubah Inggris menjadi negara industri yang maju dan modern dengan output industrinya meningkat sebesar 400%. Seperti halnya revolusi lain, revolusi industri juga membawa dampak yang lebih luas dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, baik di negara Inggris sendiri maupun di negara-negara lain. Hal itu terlihat setelah dua abad revolusi industri, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita negara-negara di dunia meningkat setelah revolusi industri dengan rata-rata

pendapatan perkapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari enam kali lipat. Hal ini semakin meyakinkan banyak negara bahwa kriteria dominan dalam pembangunan ekonomi adalah kenaikan pendapatan per kapita yang disebabkan oleh industrialisasi (Hobsbawn, 1969 dalam *The Age of Revolution: Europe 1789-1848*). Namun industrialisasi bukanlah merupakan suatu tujuan akhir dari pembangunan ekonomi, melainkan hanya salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dan berkelanjutan. Proses industrialisasi merupakan tahapan logis dalam perubahan struktur ekonomi. Tahapan ini diwujudkan secara historis melalui kenaikan kontribusi sektor manufaktur, kesempatan kerja, total produksi dan ekspor (Chenery, 1992).

Perkembangan industri melibatkan berbagai penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia kegiatan pembangunan di tunjang oleh tumbuhnya berbagai industri dengan berbagai jenis kegiatan. Sektor industri merupakan sektor potensial yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara berkembang. Oleh karena itu sektor-sektor industri kini mulai banyak didirikan di negara negara berkembang salah satunya di Indonesia. Sektor industri sendiri di Indonesia memegang peranan yang sangat penting, selain menjadi penunjang dari kegiatan perekonomian, sektor industri juga pemberi kontribusi terbesar pada PDB Indonesia dibandingkan 12 sektor lainnya.

Grafik 1.1 Total PDB Indonesia dan PDB Sektor Industri Manufaktur

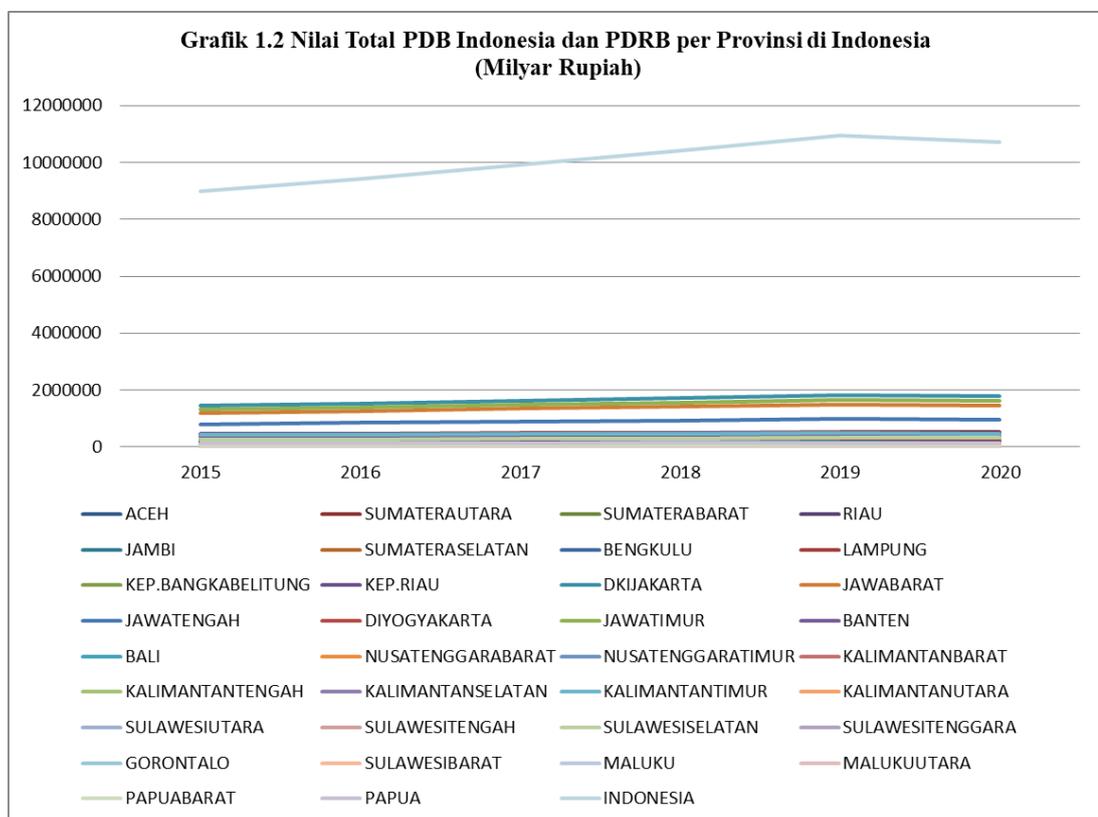
Tahun 2015-2019 (Milyar Rupiah)



Sumber: BPS 2015-2019 (diolah)

Dapat dilihat pada grafik 1.1 PDB sektor industri manufaktur pada lima tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2015 PDB sektor industri manufaktur tercatat sebesar Rp 3.654.754 Milyar, 2016 tercatat sebesar Rp 3.813.362 Milyar, di 2017 sebesar Rp 3.987.083 Milyar, 2018 sebesar Rp 4.166.905 Milyar, dan di 2019 PDB sektor industri manufaktur tercatat sebesar Rp 4.335.933 Milyar, angka-angka tersebut menunjukkan konsistensi pertumbuhan dari sektor industri manufaktur. Persentase kontribusi yang diberikan industri manufaktur pada PDB Indonesia pun sangatlah besar di banding sektor yang lain. Sektor industri tercatat memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia pada tahun terakhir sebesar 39.6 %, angka ini terlampau jauh dibanding kontribusi yang diberikan sektor lain, sektor pertanian contohnya sebagai sektor pemberi kontribusi terbesar setelah industri manufaktur hanya menorehkan angka sebesar 2,8 % pada tahun 2019.

Gap yang terjadi antara kurva total PDB Indonesia dengan PDB Sektor Manufaktur di Indonesia disebabkan oleh total kontribusi dari sektor lain terhadap total PDB Indonesia seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran;resparasi mobil dan sepeda motor.

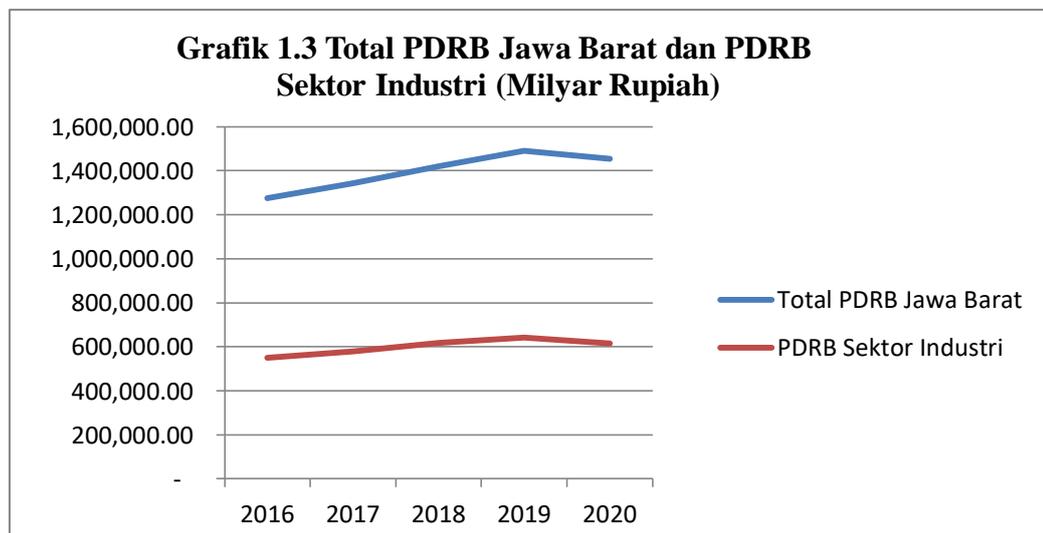


Sumber : BPS “Nilai total PDB dan PDRB per Povinsi di Indonesia” (diolah)

Dapat dilihat pada grafik 1.2 bahwa salah satu pemegang peranan penting yang sangat berpengaruh terhadap PDB Indonesia adalah pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 59% pada PDB Indonesia dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,52% pada tahun 2019. Jawa Barat sebagai salah satu provinsi pemberi

kontribusi terbesar setelah Jawa Timur dan DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 13,62% menjadikannya daerah penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan karena konsentrasi pembangunan ekonomi hanya terpusat pada Pulau Jawa dan juga banyak sekali penduduk Indonesia yang menetap di Pulau Jawa.

Secara sektoral, struktur PDRB Jawa Barat paling besar ditopang oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 42,96%. Hal ini semakin menunjukkan bahwa sektor industri memiliki peranan penting dan menjadi penggerak utama bagi perekonomian nasional maupun regional. Selain itu, PDRB industri juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja karena semakin tingginya nilai output yang dihasilkan oleh industri maka akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

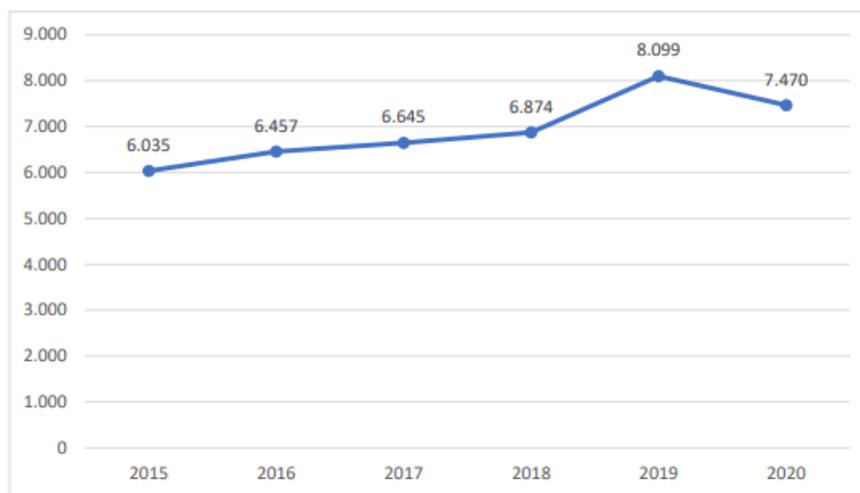


Sumber : BPS Jawa Barat (diolah)

Dapat dilihat pada grafik 1.3 bahwa total PDRB Jawa Barat pada tahun 2019 sebesar Rp 1.491.575,95 Milyar dengan PDRB sektor industri sebesar Rp

616.441,68 Milyar dan total kontribusi yang diberikan sektor industri pada PDRB Jawa Barat yaitu sebesar 42,99%. Peranan besar yang dimiliki sektor industri dikarenakan letak Jawa Barat yang strategis juga infrastruktur yang mendukung mudahnya mobilitas barang membuat menjamurnya pertumbuhan sektor industri di Jawa Barat. Kawasan Jawa Barat juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan industri dan perdagangan mengingat Provinsi Jawa Barat memiliki Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang yang di proyeksikan untuk memperbesar pasar ekspor.

**Grafik 1.4 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Jawa Barat
Tahun 2015-2020 (Unit)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan grafik 1.4 jumlah perusahaan industri dari tahun 2015-2020 perkembangan industri besar dan sedang yang tercatat dalam direktori industri di Jawa Barat mengalami tren terus meningkat. Pada akhir tahun 2015 tercatat terdapat 6.035 unit perusahaan industri besar dan sedang. Peningkatan yang

paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yakni meningkat sebesar 8.099 unit perusahaan dari 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah industri besar dan sedang di Jawa Barat mengalami penurunan 7.470 unit perusahaan. Penurunan yang dialami tersebut dikarenakan adanya pandemi yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Sejak awal munculnya pandemi Covid 19 semua sektor industri terkena imbasnya yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Karena itu banyaknya jumlah perusahaan atau usaha industri besar dan sedang di Jawa Barat menjadi salah satu faktor untuk menyerap tenaga kerja, namun tergantung kepada jenis perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan padat modal, maka banyaknya jumlah perusahaan tidak berpengaruh besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan padat karya maka akan banyak menyerap tenaga kerja.

Tabel 1.1 Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri Kecil, Menengah dan Besar di Jawa Barat Tahun 2020

No	Kota/Kabupaten	Unit Usaha	(%)	Tenaga Kerja	(%)
1	Kab. Sukabumi	15.329	8.20	214.278	6.38
2	Kab. Bogor	14.333	7.67	338.687	10.08
3	Kab. Bandung	13.483	7.21	189.850	0.57
4	Kab. Purwakarta	10.704	5.72	117.395	3.49
5	Kota Bandung	10.701	5.72	121.120	0.36
6	Kab. Bekasi	10.580	0.57	194.221	5.78
7	Kab. Cirebon	10.427	5.58	158.320	0.47
8	Kota Depok	9.949	5.32	165.573	4.93
9	Kota Bekasi	9.775	5.23	107.582	3.20

10	Kota Tasikmalaya	9.591	5.13	118.064	3.51
11	Kab. Garut	9.763	5.22	168.188	5.01
12	Kota sukabumi	9.363	5.01	130.131	3.87
13	Kota Cirebon	9.379	5.02	158.320	0.47
14	Kab. Karawang	9.341	5.00	215.580	0.64
15	Kota Banjar	9.248	4.95	155.203	4.62
16	Kota Bogor	8.227	4.40	268.543	7.99
17	Kab. Majalengka	7.396	3.96	143.681	4.28
18	Kota Cimahi	6.112	3.27	187.215	5.57
19	Kab. Sumedang	5.130	0.27	159.477	4.75
20	Kab. Subang	3.410	1.82	140.693	4.19
21	Kab. Indramayu	2.377	1.27	123.391	3.67
22	Kab. Kuningan	2.350	1.26	191.760	0.57
23	Kab. Tasikmalaya	1.480	0.79	171.899	5.12
24	Kab. Ciamis	1.382	0.74	189.917	5.65
25	Kab. Cianjur	1.244	0.67	159.294	4.74
26	Kab. Bandung Barat	52	0.03	2.251	0.07
	Jumlah	186.987	100.00	3.359.178	100,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 1.1 menggambarkan jumlah unit usaha dan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Kabupaten Sukabumi berkontribusi terbesar pada sektor industri dengan jumlah unit usaha terbanyak pertama di Jawa Barat dengan jumlah 15.329 unit usaha (8.20%), dan dilanjutkan dengan Kabupaten Bogor 14.333 unit usaha (7.67%), dan yang ketiga Kabupaten Bandung dengan jumlah 13.483 unit usaha (7.21%). Sedangkan daerah yang berkontribusi sedikit pada sektor industri Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung Barat (0,03%), Kabupaten Canjur (0,67%), Kabupaten Ciamis (0,74%). Bandung

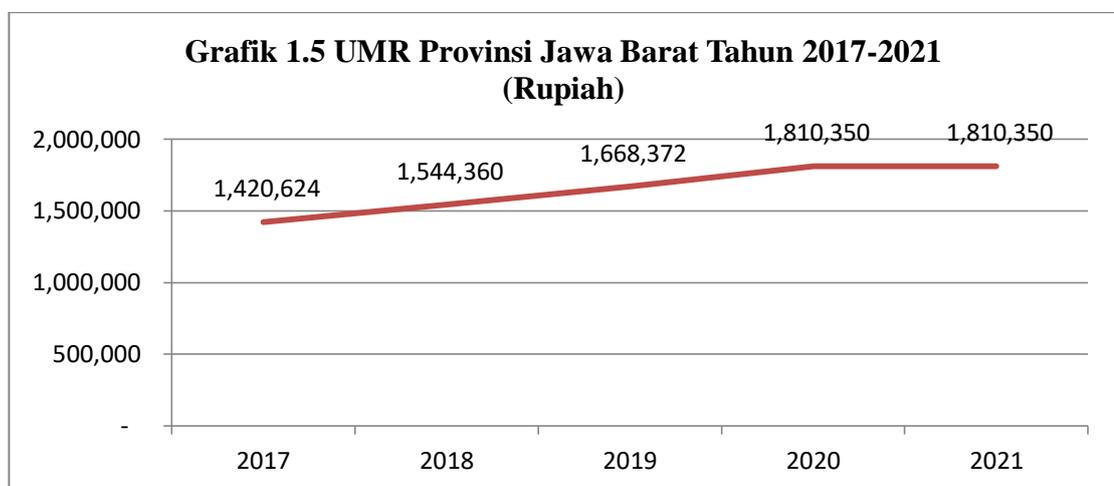
Raya dan Kota Cimahi termasuk pada urutan ke 2 Kota atau Kabupaten yang berkontribusi sedikit yaitu sebanyak 6.122 unit usaha (3.27%) terhadap sektor industri di Jawa Barat setelah Kab. Bandung Barat sebanyak 52 unit usaha (0.03%) dikarenakan pada kedua kota tersebut merupakan kota yang terdampak covid paling tinggi sehingga terjadi penurunan jumlah unit usaha dikarenakan kebijakan pemerintah yang memberlakukan PPKM sehingga berdampak pada permintaan produksi yang menurun.

Penyerapan tenaga kerja juga tidak terlepas dari peranan pemerintah sebagai penyusun kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang baik, serta strategi-strategi yang dilakukan demi tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas perekonomian juga diperlukan untuk menjamin perekonomian berjalan dengan lancar. Penyediaan lapangan kerja yang besar diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Perbaikan kualitas sumberdaya manusia juga mutlak diperlukan karena merupakan modal pembangunan. Tersedianya tenaga kerja yang besar jika dimanfaatkan, dibina, dan dikerahkan untuk bisa terserap di sektor ini dan menciptakan tenaga kerja yang efektif akan menjadi modal yang besar dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di Jawa Barat yaitu upah. Teori upah menjelaskan bahwa upah ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi industri, upah yang tinggi membuat biaya produksi industri juga meningkat. Mengakibatkan harga suatu

produk juga meningkat, hal ini menurunkan jumlah permintaan tenaga kerja.

Upah minimum regional merupakan upah yang diterima pekerja dan harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu daerah. Sedangkan upah rata-rata provinsi adalah jumlah rata-rata upah minimum di seluruh provinsi (Statistik Indonesia, 2007).

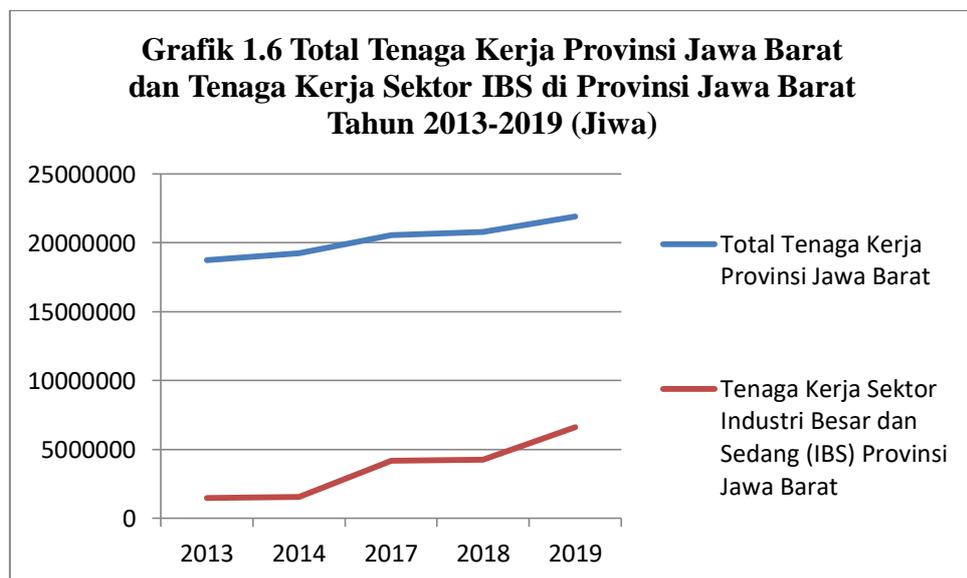


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Pada grafik 1.5 menunjukkan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 dimana UMR tersebut menggambarkan rata-rata upah minimum per kabupaten/kota di Jawa Barat. UMR Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 UMR Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1.810.350. namun pada tahun 2021 UMR Provinsi Jawa Barat tidak mengalami kenaikan. Walaupun begitu di beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat upah minimum nya mengalami kenaikan. Kenaikan upah minimum bisa menyebabkan pengurangan penyerapan tenaga kerja apabila dilihat dari sisi permintaan tenaga kerja, oleh karenanya hal tersebut

dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja terutama pada sektor industri.

Sektor industri diharapkan dapat menjadi *leading sector* bagi sektor lainnya. Dengan adanya pembangunan industri maka diharapkan dapat mengangkat sektor lainnya seperti sektor pertanian, sektor keuangan, sektor pengangkutan dan sektor lainnya, karena sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan (Dumairy, 1996). Dengan dilakukannya industrialisasi diharapkan dapat memberikan peluang kesempatan kerja untuk menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



Sumber : BPS Jawa Barat (diolah)

Total tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, itu terlihat dari tahun 2018 tenaga kerja pada sektor industri berjumlah 4.256.694 jiwa lalu mengalami lonjakan pada

tahun 2019 dengan total jumlah pekerja pada sektor industri sebesar 6.612.384 jiwa dengan total pekerja pada setiap sektor sebanyak 20.779.888 jiwa. Kenaikan dalam penyerapan tenaga kerja secara umum dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya jumlah industri yang berdiri, tingginya nilai output yang dihasilkan oleh suatu industri, tingginya investasi pada suatu industri dan lain-lain. Selain itu, tingginya rendahnya penyerapan tenaga kerja juga dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang menggunakan padat karya maupun padat modal. Apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan padat karya maka tenaga kerja yang terserap akan tinggi, sedangkan apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang padat modal maka tenaga kerja yang diserap akan rendah.

Jumlah penduduk yang tinggi menjadi modal besar untuk mendorong perekonomian karena salah satu faktor pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia sebagai pelaku dalam melaksanakan pembangunan. Akan tetapi jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan bahkan dapat berbanding terbalik karena jumlah penduduk yang besar akan membawa akibat jumlah angkatan kerja yang besar pula. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya jumlah penduduk harus seimbang dengan jumlah sumber-sumber ekonominya. Ini berarti jumlah penduduk tidak terlampau sedikit tetapi juga tidak boleh terlampau banyak. (Mulyadi, 2003)

Salah satu yang harus diperhatikan dalam pembangunan industri agar terjadi hubungan positif antara pertumbuhan industri dengan penyerapan tenaga kerja adalah bagaimana agar pembangunan industri dapat memberikan kontribusi

yang nyata dalam penyerapan tenaga kerja dan dalam mengatasi pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait lainnya dapat menentukan jenis industri apa yang cocok dikembangkan. Salah satu industri yang dapat menjadi perhatian pemerintah adalah industri manufaktur. Perlunya peranan pemerintah upaya mengatasi melalui pembinaan dan pengembangan industri manufaktur diharapkan dapat memberikan hasil yang diharapkan melalui peningkatan bantuan lunak dan peningkatan bantuan keras dapat meningkatkan motivasi, pengetahuan, keterampilan dan wawasan atau pandangan yang luas sehingga lebih mempermudah proses penyerapan tenaga yang dibutuhkan.

Masalah penyerapan tenaga kerja ini juga tidak terlepas dari kesempatan yang tersedia di tengah-tengah masyarakat. Negara berkembang berkeyakinan bahwa sektor industri mampu mengatasi masalah-masalah perekonomian dengan asumsi bahwa sektor industri dapat memimpin sektor-sektor perekonomian lainnya menuju pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Saragin dalam buku Hasibuan bahwa sektor industri dipersiapkan agar mampu menjadi penggerak dan memimpin terhadap sektor perekonomian lainnya. Lewis dalam Todaro dan Smith mengatakan, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan pada sektor industri. Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan GNP (*Gross National Product*), atau GDP (*Gross Domestic Product*), pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi dibutuhkan kerjasama yang baik antar sektor perekonomian. Kerjasama yang baik

antar sektor mengakibatkan setiap kegiatan sektor produksi memiliki daya menarik (*backward linkage*) dan daya mendorong (*forward linkage*) terhadap sektor lain.

Berdasarkan fenomena di atas dapat kita ketahui bahwa sektor industri besar dan sedang di Jawa Barat merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja cukup banyak namun seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat juga perlu diketahui faktor-faktor yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja terutama pada sektor industri yang merupakan sektor penyumbang terbesar dalam PDRB Jawa Barat sehingga diharapkan masalah pengangguran dapat teratasi. Maka dari itu penulis ingin meneliti terkait **“ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI BESAR DAN SEDANG DI JAWA BARAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan tenaga kerja, jumlah perusahaan, UMK, investasi, dan PDRB pada sektor industri Besar dan Sedang di Jawa Barat tahun 2009-2018?
2. Bagaimana pengaruh jumlah perusahaan, UMK, investasi, dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri Besar dan Sedang di Jawa Barat tahun 2009-2018?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui perkembangan tenaga kerja, jumlah perusahaan, UMK, investasi, dan PDRB pada sektor industri Besar dan Sedang di Jawa Barat tahun 2009-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah perusahaan, UMK, investasi, dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri Besar dan Sedang di Jawa Barat tahun 2009-2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan gambaran yang mungkin akan berguna dalam melanjutkan penelitian yang sejenis yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktik/Empiris

1. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
2. Sebagai bahan ilmu pengetahuan dan perluasan wawasan bagi penulis.
3. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemerintah terkait dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan pengembangan industri besar dan sedang.